



KETUA KOMISI A SUSANTO DWIANTORO Tegakkan Aturan, Sat Pol PP Jangan 'Bermain' Politik



ah politik, terutama untuk urusan tebang pilih objek yang ditertibkan.

Ketua Komisi A DPRD Kota Yogya Susanto Dwi Antoro, menegaskan penegakan aturan menjadi salah satu ketugasan di alat kelengkapan yang dipimpinnya. Sejak awal tahun pihaknya sudah mencoba memetakan berbagai persoalan yang berkaitan dengan pelanggaran perda. "Semangat yang dibangun adalah bagaimana semua bisa menaati aturan yang sudah disepakati bersama. Apalagi jika telah dituangkan dalam perda maupun perwal sebagai juknisnya. Kami sudah mulai melakukan pemetaan. Terutama dari yang terlihat dulu seperti pendirian reklame, hotel hingga vandalisme," urainya, Minggu (9/3).

Terhadap temuan pelanggaran maka harus ada upaya penertiban sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga aparat terutama Sat Pol PP yang memiliki tanggung jawab sebagai pengawal dan penegak perda, tidak boleh tebang pilih atau bahkan bermain politik.

Sayangnya, imbuh Toro sapaan akrabnya, siasat tebang pilih hingga terkesan bermain politik justru terlihat oleh Sat Pol PP Kota Yogya.

YOGYA (KR) - Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) menjadi garda terdepan dalam menjaga ketertiban umum serta penegakan perda. Khusus dalam penegakan aturan, Sat Pol PP Kota Yogya bahkan jangan sampai ikut bermain dalam kanc

Dirinya mencontohkan aksi vandalisme yang masih cukup banyak ditemui namun tindakan penertiban terkesan lemah. Lain halnya ketika saat itu muncul aspirasi di berbagai daerah termasuk Kota Yogya, berupa tulisan 'Adili Jokowi' di ruang publik. Tidak sampai hitungan hari, tulisan tersebut langsung lenyap ditertibkan Sat Pol PP. Sementara vandalisme lain yang lebih dulu mengotori ruang publik justru tak kunjung ditertibkan. "Ini satu bukti ada dugaan ikut bermain politik. Kenapa musti takut, atau memang ada tekanan. Kalau tulisan 'Adili Jokowi' saja bisa ditertibkan dengan kilat, maka pelanggaran lainnya seharusnya juga bisa dong," tegasnya.

Upaya tebang pilih dalam menertibkan pelanggaran justru akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Seperti halnya penertiban para pedagang kuliner atau kopi di kawasan Kotabaru. Di mana Sat Pol PP Kota Yogya baru bertindak ketika sudah memunculkan keramaian. Hal seperti itu, terang Toro, seharusnya sudah bisa dideteksi sejak awal.

"Mestinya kan sudah bisa dideteksi. Bukannya hampir setiap hari ada yang patroli melakukan pemantauan? Kalau sudah menimbulkan kegaduhan, lantas siapa yang dirugikan? Akhirnya masyarakat juga kan," tanyanya.

Begitu juga masalah reklame maupun pendirian hotel. Jajarannya sudah meminta bidang-bidang terkait di jajaran eksekutif untuk mengumpulkan bukti. Terutama kesesuaian antara perizinan dengan teknis di lapangan maupun yang tidak mengantongi izin. Siapapun pemilik atau pengelolanya, sepanjang menabrak aturan yang ada maka wajib untuk segera ditertibkan. "Kita jaga betul, jangan sampai ada pembiaran karena itu akan merusak iklim investasi di kota ini," terangnya. **(Dhi)-f**



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005